

JOURNAL OF INTEGRATIVE INTERNATIONAL RELATIONS, Vol:No (YEAR) p-p  
Copyright © Department of International Relations UIN Sunan Ampel Surabaya  
ISSN 2477-3557 (Print)  
DOI: xxx-xxxxxx

# UPAYA PELESTRIAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH WALHI SULAWESI SELATAN DALAM PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Aydil Safitri

*Department of International Relations Universitas Fajar, Makassar, Indonesia*

*E-mail: <mailto:aydilsafitri@gmail.com>*

Kardina, S.IP, MA

*Department of International Relations Universitas Fajar, Makassar, Indonesia*

*E-mail: [kardina@unifa.ac.id](mailto:kardina@unifa.ac.id)*

## Abstract

*This study describes the efforts to preserve the environment carried out by the environmental organization (WALHI) Wahana Lingkungan Hidup South Sulawesi. This research uses analytical descriptive method which show the result that the efforts made by WALHI South Sulawesi are in accordance with the principle and objectives in green theory, sustainable development, and Sustainable Development Goals (SDGs). However, these efforts have not brought big changes so it can be concluded that these efforts have not reached the green targets in the 15<sup>th</sup> Sustainable Development Goals (SDGs).*

Penelitian ini menjelaskan mengenai upaya pelestarian lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh organisasi lingkungan (WALHI) Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang menunjukkan hasil bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh WALHI Sulawesi Selatan sesuai dengan prinsip dan tujuan dalam teori hijau, pembangunan berkelanjutan, serta Sustainable Development Goals (SDGs). Namun, upaya-upaya tersebut belum membawa perubahan yang besar sehingga dapat disimpulkan upaya tersebut belum sampai pada target hijau dalam Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya yang ke-15.

**Keywords:** Sustainable Development Goals (SDGs); WALHI South Sulawesi; green theory; sustainable development

## Introduction

*Setelah berakhirnya perang dunia yang ke II, hampir semua negara fokus untuk menata pembangunan. Didukung oleh transformasi yang terjadi dalam studi Hubungan Internasional yang menjadikan perhatian terhadap low politics (isu politik dan ekonomi global) semakin mendorong negara-negara untuk meningkatkan kapasitas dibidang ekonomi yang tidak lepas pula dari pembangunan.<sup>1</sup> Namun, ada yang terlupakan dengan pesatnya pembangunan, yakni masalah lingkungan hidup yang dari waktu ke waktu kualitasnya makin memburuk. Hubungan Internasional sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan kemudian mulai melihat fenomena- fenomena ataupun peristiwa-peristiwa di dunia internasional tersebut dan menjadikannya kajian untuk dipelajari lebih lanjut.*

*Isu-isu lingkungan menimbulkan tantangan besar terutama yang berkaitan dengan peran dan pentingnya sebuah negara dan gagasan kedaulatan yang ada didalamnya. lalu hubungan antara lingkungan internasional dan domestik dari kegiatan politik, serta hubungan antara pengetahuan, nilai-nilai, kekuatan, dan kepentingan dalam menentukan hasil dalam proses internasional. Permasalahan-permasalahan tentang lingkungan ini, kemudian memunculkan perdebatan-perdebatan diantara kelompok-kelompok masyarakat tertentu, yang kemudian dari perdebatan-perdebatan ini muncul suatu kesadaran untuk menjelaskan isu tentang lingkungan itu sendiri.*

*Sustainable Development Goals (SDGs) sendiri secara resmi terbentuk pada Sidang Umum PBB ke-70 bulan Desember 2015 di New York, Amerika Serikat. Sebanyak 193 kepala negara dan pemerintahan dunia hadir untuk menyepakati agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen berjudul Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development.<sup>2</sup> SDGs membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu 1) People (manusia), 2) Planet (bumi), 3) Prosperity (kemakmuran), 4) Peace (perdamaian), dan 5) Partnership (kerjasama). Kelima prinsip dasar ini menaungi 17 tujuan dan 169 sasaran yang tidak dapat dipisahkan, saling terhubung, dan terintegrasi satu sama lain guna mencapai kehidupan manusia yang lebih baik.<sup>3</sup>*

*Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut berkomitmen untuk berkontribusi dalam menwujudkan 17 tujuan dan 169 sasaran yang telah ditentukan dalam SDGs. Posisi Indonesia sendiri sebagai negara berkembang kini harus memprioritaskan SDGs dalam pembangunan nasional maupun*

daerah, salah satunya dengan memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Untuk mewujudkan pembangunan yang baik dan berkesinambungan, perlu adanya keikutsertaan dari masyarakat sipil, korporasi/perusahaan, organisasi, serta lembaga-lembaga konservasi dan tentunya pemerintah yang berkomitmen. Dalam hal ini, organisasi non-pemerintah sekaligus LSM yang telah lama berkecimpung pada masalah lingkungan hidup adalah WALHI (Wahana Lingkungan Hidup).

WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) adalah organisasi lingkungan tertua di Indonesia yang terbentuk sejak Oktober 1980 dengan semangat untuk meningkatkan isu-isu lingkungan dan memberikan advokasi kepada masyarakat yang lingkungannya mengalami kerusakan akibat eksploitasi dan modernisasi yang tengah marak terjadi.<sup>4</sup> WALHI Sulawesi Selatan sendiri berdiri pada tahun 1991. Secara singkat alasan berdirinya WALHI Sulawesi Selatan yakni untuk memperkuat gerakan lingkungan secara nasional.<sup>5</sup> Keberadaan WALHI tersebut dianggap sangat penting mengingat Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan wilayah yang luas dan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga arus pembangunan juga lebih tinggi dibanding dengan provinsi-provinsi lainnya di Pulau Sulawesi. Jika hal ini tidak direncanakan dengan baik dan matang, maka dapat membawa dampak negatif terhadap lingkungan.

Di Sulawesi Selatan sendiri aktivitas dan model pembangunan tanpa memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan. Terlihat dari meningkatnya wilayah hutan kritis, tingginya laju peningkatan izin pertambangan, serta tata kelola ruang daerah yang tidak memperhatikan dampak lingkungan merupakan masalah serius yang harus ditangani. Sebab apabila dibarkan berkelanjutan, dapat membawa potensi bencana seperti banjir dan tanah longsor.<sup>6</sup> Hadirnya WALHI diharapkan dapat memberikan advokasi dan pendampingan terhadap pembangunan di Sulawesi Selatan agar tetap menciptakan pembangunan yang adil, yakni pembangunan yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Melalui usaha-usaha dalam mewujudkan SDGs pada tahun 2030 ini, berangkat dari masyarakat daerah hingga masyarakat dunia mengharapkan adanya perubahan yang signifikan sehingga dapat pula mengubah kehidupan ke arah yang lebih baik, bukan hanya berfokus kepada manusia sebagai pusat kehidupan (*human centered*) namun juga mementingkan aspek lingkungan hidup sebagai sumber utama bagi kehidupan.

## **Non Governmental Organization (NGO)**

*Pengertian umum dari istilah NGO atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) pada dasarnya sama dengan pengertian umum lembaga sukarela, (Private Voluntary Organization) atau ORNOP (Organisasi Non Pemerintah) yang berasal dari terminologi PBB, yaitu NGO (Non Governmental Organization), didefinisikan sebagai organisasi swasta yang kegiatannya ditujukan untuk membebaskan penderitaan, memajukan kepentingan kaum miskin, melindungi lingkungan, menyediakan pelayanan dasar masyarakat, atau menangani pengembangan masyarakat. Dalam arti luas, istilah LSM diterapkan pada organisasi nonprofit yang bebas dari pemerintah. LSM merupakan organisasi yang berbasis nilai yang secara keseluruhan atau sebagian tergantung pada lembaga donor dan pelayanan sukarela. Jadi prinsip altruisme dan voluntarisme ditetapkan sebagai definisi karakter kuncinya.<sup>7</sup>*

*Selain itu, organisasi non-pemerintah (Ornop) atau Non Governmental Organization (NGO) mengandung arti independen, tidak terkooptasi pemerintah, dan merupakan entitas gerakan yang dibentuk oleh masyarakat di luar negara serta memiliki karakter tersendiri yang disepakati oleh dunia internasional sebagai organisasi kerelawanan di luar pemerintah.<sup>8</sup>*

*Terdapat empat jenis NGO atau lembaga swadaya masyarakat, antara lain adalah:*

- 1. Organisasi donor, yaitu LSM yang memberikan dukungan biaya bagi kegiatan LSM lain.*
- 2. Organisasi mitra pemerintah, yaitu LSM yang bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan kegiatannya.*
- 3. Organisasi profesional, yaitu LSM yang melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan profesional tentunya seperti LSM bidang pendidikan, bantuan hukum, jurnalisme, lingkungan dan pengembangan ekonomi.*
- 4. Organisasi oposisi, yaitu LSM yang melakukan kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah. LSM ini bertindak melakukan kritik dan pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan pemerintah.<sup>9</sup>*

*Jika merujuk dari kategori NGO diatas, posisi WALHI Sulawesi Selatan adalah berada pada kategori yang ke-4, yaitu organisasi atau lembaga oposisi yang melakukan kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah dengan melakukan kritik, pengawasan, saran serta masukan yang diharapkan dapat membawa dampak positif. Dalam hal ini, WALHI Sulawesi Selatan berperan sebagai organisasi nonprofit dengan nilai voluntarisme atau kesukarelaan untuk fokus melindungi lingkungan hidup yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Sehingga segala kegiatan yang dilaksanakan oleh WALHI Sulawesi Selatan didasari pada prinsip-prinsip hijau untuk kesejahteraan lingkungan dan masyarakat lokal.*

### **Green Political Theory**

*Jackson & Sorensen dalam bukunya yang berjudul Introduction to International Relations berpendapat bahwa Green Politics atau Teori hijau muncul dan turut hadir untuk memberikan pandangannya dalam Hubungan Internasional sejak tahun 1960-an atau sekitar abad ke-20. Teori ini pada awalnya muncul untuk mengkritik perspektif liberalisme dan melihat isu-isu nyata ketika perang dingin telah mengakibatkan kerusakan lingkungan secara berlebihan.<sup>10</sup>*

*Dalam hal ini, Jackson & Sorensen melihat bagaimana aktivitas-aktivitas manusia setelah berakhirnya perang dunia II dapat membawa pengaruh terhadap lingkungan disekitarnya, serta bagaimana aktivitas tersebut dapat memiliki dampak hingga melewati batas yang akhirnya secara tidak langsung menjadikan lingkungan hidup sebagai objek eksploitasi. Ditambah dengan arus pemikiran liberalisme yang kini banyak dicanangkan sebagai landasan dalam pembangunan dan perekonomian membuat maraknya industrialisasi diberbagai negara. Sehingga aspek lingkungan hidup seringkali dilupakan. Jackson & Sorensen melihat perlu adanya kesadaran akan lingkungan hidup mengingat lingkungan merupakan penopang kehidupan manusia baik untuk kehidupan masa kini maupun generasi yang akan datang.*

*Terdapat 10 prinsip dalam Green Political Theory yang menjadi dasar dan tujuan pada proses penyampaian kebijakan politik, antara lain:<sup>11</sup>*

- 1. Kesadaran dan keberlangsungan ekologi*

*Manusia harus bertindak berdasarkan pemikiran bahwa ia merupakan bagian dari alam, bukan memiliki posisi di atas alam. Oleh karena itu, manusia perlu untuk menyelaraskan kegiatannya dengan ekosistem.*

- 2. Demokrasi akar rumput*

*Demokrasi dalam pendekatan Politik Hijau perlu dilakukan dari tingkat “akar rumput” yang berarti diterapkan dari tingkat masyarakat lokal. Setiap manusia berhak untuk berpendapat mengenai keputusan yang berpengaruh bagi kehidupan mereka.*

3. *Keadilan sosial dan persamaan kesempatan*

*Semua orang memiliki hak dan kesempatan yang sama atas sumber daya yang berasal dari masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, hambatan-hambatan sosial dalam memperoleh hak dan kesempatan tersebut harus dihilangkan dengan adanya peraturan yang terikat hukum.*

4. *Anti kekerasan*

*Kebiasaan masyarakat untuk menggunakan kekerasan dalam penyelesaian masalah dianggap tidak benar, untuk mempertahankan diri pada situasi yang terdesak dapat dilakukan dengan tindakan non-kekerasan.*

5. *Desentralisasi*

*Politik Hijau mendukung upaya restrukturisasi institusi politik, sosial, dan ekonomi yang dikuasai oleh orang-orang tertentu. Pengambilan keputusan harus dilakukan pada tingkat individu atau lokal.*

6. *Ekonomi berbasis komunikasi dan berkeadilan*

*Penerapan sistem ekonomi yang berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja dan standar hidup yang baik tanpa mengabaikan keseimbangan ekosistem.*

7. *Feminisme*

*Politik Hijau menghormati perbedaan pendapat dan gender.*

8. *Penghormatan terhadap keragaman*

*Adanya keyakinan mengenai pentingnya keragaman budaya, etnis, ras, dan agama. Perbedaan-perbedaan yang ada tersebut juga harus tercermin dalam badan atau organisasi pengambil keputusan.*

9. *Tanggung jawab personal dan global*

*Adanya dukungan bagi tindakan individu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup selama tindakan tersebut tidak mengabaikan keseimbangan ekosistem dan harmoni sosial.*

#### *10. Fokus pada masa depan dan berkelanjutan*

*Tindakan dan kebijakan yang diambil berdasarkan pandangan Politik Hijau memiliki tujuan jangka panjang. Mereka berjuang dalam perlindungan SDA, mengembangkan ekonomi berkelanjutan, dan membuat peraturan yang turut memperhatikan ekosistem. Hal ini dikarenakan kebijakan atau tindakan yang diambil saat ini ikut bertanggung jawab terhadap generasi yang akan datang.*

*Sebagai salah satu buah pemikiran yang lahir dari teori hijau, pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan dan arah yang sama dengan asumsi yang dikemukakan oleh para ahli diatas. Yaitu pemikiran yang muncul dari kesadaran akan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan mencoba menyelaraskan aspek-aspek ekonomi, pembangunan, sosial dan lingkungan dalam aktivitas yang dilakukan manusia.*

### ***Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)***

*Sebagai sebuah konsep yang lahir dari teori hijau, pembangunan yang berkelanjutan mengandung pengertian sebagai pembangunan yang memperhatikan dan mempertimbangkan dimensi lingkungan hidup dalam pelaksanaannya.<sup>12</sup> Selain itu, definisi yang paling umum digunakan untuk mengartikan pembangunan berkelanjutan adalah sesuai dengan Brundtland Repoort berjudul "Our Common Future" dalam World Commission on Environment and Development (WCED) 1987 yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang yang konsepnya terdiri dari tiga aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.<sup>13</sup> Ada dua hal yang secara implisit menjadi perhatian dalam konsep Bruntland tersebut. Pertama, menyangkut pentingnya memperhatikan kendala sumber daya alam dan lingkungan terhadap pola pembangunan dan konsumsi. Kedua, menyangkut perhatian pada kesejahteraan (well being) generasi mendatang.*

*Sofyan Effendi berpendapat bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya, arah invesinya, orientasi pengembangan teknologinya dan perubahan kelembagaannya dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara konseptual, pembangunan*

*berkelanjutan dapat diartikan sebagai transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi dan politik untuk meningkatkan kepastian masyarakat dalam memenuhi kepentingannya pada saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kepentingan mereka.<sup>14</sup>*

*Sesuai dengan pengertian-pengertian diatas, konsep dan teori pembangunan berkelanjutan telah dituangkan dalam tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan 17 tujuan dan 169 sasaran, dijelaskan secara rinci mengenai keadaan-keadaan global yang harus dibenahi serta rencana dan strategi dalam menanggulangnya. Adapun ke-17 tujuan tersebut yaitu:<sup>15</sup>*

- 1. Menghapus segala bentuk kemiskinan*
- 2. Mengakhiri kelaparan. Mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan*
- 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia*
- 4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua*
- 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan*
- 6. Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan*
- 7. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern*
- 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua*
- 9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi*
- 10. Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara*
- 11. Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan*
- 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan*



13. *Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya*
14. *Melestarikan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan*
15. *Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati*
16. *Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkat*
17. *Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.*

*Sejalan dengan teori dan konsep pembangunan berkelanjutan, tujuan-tujuan diatas bukan hanya mementingkan aspek ekonomi, pembangunan ataupun sosial, namun juga memperhatikan aspek lingkungan hidup. Dimana hal tersebut tertuang dalam tujuan SDGs yang ke-15 “melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati” atau biasa dikenal dengan perlindungan terhadap ekosistem darat (life on land). Tujuan ini ditekankan sebagai bentuk kepedulian yang seharusnya terus ditingkatkan dalam rangka membangun sebuah negara ataupun daerah agar selalu sejalan dengan konsep dalam teori pembangunan.*

### ***Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang ke-15 oleh WALHI Sulawesi Selatan***

*Sesuai dengan peran yang dijalankan oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) sebagai lembaga sekaligus forum masyarakat sipil yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan isu-isu lingkungan, WALHI Sulawesi Selatan dalam menjalankan upayanya untuk pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang ke-15 adalah dengan melakukan advokasi dalam bidang lingkungan hidup.*

*Aktivitas advokasi lingkungan hidup pada prinsipnya melibatkan advokasi kebijakan dan penegakan hukum, pendidikan umum, dan pembelaan masyarakat. WALHI Sulawesi Selatan sendiri selain melakukan advokasi, juga bertindak sebagai adviser atau pemberikan masukan terhadap pemerintah untuk memastikan peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang ditetapkan di Sulawesi Selatan agar berjalan sesuai dengan tujuan-tujuan dan prinsip dalam Sustainable Development Goals SDGs.<sup>16</sup>*

*WALHI Sulawesi Selatan memiliki 3 capaian utama dalam Sustainable Development Goals (SDGs), berupa:*

- 1. Perlindungan terhadap Ekosistem Penting*
- 2. Energi Terbarukan*
- 3. Iklim dan Pemulihan Lingkungan<sup>17</sup>*

*Berdasarkan penjelasan diatas, terlihat keterkaitan antara tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yang ke-15 yang membahas mengenai life on land / ekosistem darat dengan ke-3 tujuan dalam advokasi WALHI Sulawesi Selatan. Hal tersebut terdapat pada wilayah ekosistem penting berupa hutan dan karst, penggunaan energi terbarukan, serta pemulihan terhadap lingkungan. Untuk itu, WALHI Sulawesi Selatan, melakukan upaya-upaya tersendiri agar mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang lebih baik sesuai dengan tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Upaya-upaya tersebut berupa kegiatan advokasi yang terbagi atas 2 bentuk sebagai berikut:*

### **1. Advokasi Kebijakan**

*Di dalam advokasi kebijakan, WALHI Sulawesi Selatan menjalankan kegiatan yang dapat mempengaruhi sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup. Kegiatan advokasi ini terdiri atas studi kelayakan lingkungan dan lobi.*

*Studi kelayakan lingkungan yang dilakukan oleh WALHI Sulawesi Selatan pada dasarnya bertujuan untuk meninjau kegiatan-kegiatan ataupun proyek yang sudah berjalan dengan maksud untuk mempelajari lebih lanjut dan melihat apakah ada potensi ataupun dampak dari kerusakan lingkungan yang dapat terjadi dari sebuah aktivitas atau proyek. Studi kelayakan lingkungan ini adalah kegiatan yang wajib dilakukan sebelum WALHI Sulawesi Selatan melakukan proses lobi dengan pemerintah. Sebab dengan dilakukannya studi, WALHI Sulawesi Selatan*

*dapat memaparkan hasil penelitiannya terhadap suatu kasus yang dapat mendukung proses lobi nantinya.<sup>18</sup>*

*Advokasi WALHI Sulawesi Selatan melalui lobi pada umumnya merupakan kelanjutan dari kegiatan investigasi atau studi yang telah dilakukan sebelumnya. Lobi tersebut dilakukan dengan cara memaparkan hasil studi dari sebuah kasus yang menunjukkan adanya aktivitas-aktivitas yang dapat merusak lingkungan kepada pemerintah yang bersangkutan atau bertanggung jawab disebuah wilayah atau daerah. Sehingga dalam 5 tahun terakhir terkait dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yang ke-15 mengenai ekosistem darat, WALHI Sulawesi Selatan banyak melakukan proses lobi yang berhubungan dengan masalah atau kasus yang ditimbulkan oleh perusahaan- perusahaan tambang yang beroperasi di daerah-daerah Sulawesi Selatan.*

## **2. Advokasi Sosial**

*Berbeda dengan advokasi kebijakan yang diupayakan untuk mengubah atau membuat suatu keputusan baru, advokasi sosial yang dilaksanakan oleh WALHI Sulawesi Selatan bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman akan pentingnya lingkungan hidup kepada khalayak banyak khususnya masyarakat. Kegiatan ini digerakkan dengan melakukan kampanye dibidang lingkungan hidup dan sosialisasi kepada masyarakat.*

*Sesuai dengan pemikiran dalam pembangunan berkelanjutan, kampanye yang dilakukan oleh WALHI Sulawesi Selatan bertujuan untuk menyampaikan suatu pesan secara efektif dan berdampak tentang isu-isu lingkungan lewat proses yang terjadi. Melalui kampanye, WALHI Sulawesi Selatan berharap dapat membawa perubahan baik kepada masyarakat berupa peningkatan kesadaran dan kepedulian terhadap perilaku dan aktivitas yang berhubungan dengan lingkungan hidup, bukan hanya mengutamakan pembangunan dibidang ekonomi dan sosial.*

*WALHI Sulawesi Selatan berpendapat bahwa dalam memperjuangkan keadilan lingkungan dan perbaikan lingkungan kekuatan utama terletak pada masyarakat itu sendiri. WALHI juga tidak pernah mewakili masyarakat tapi bersama-sama dengan masyarakat menyelamatkan lingkungan. Sehingga kepercayaan publik yang lahir itu semakin tinggi, dimana setiap ada permasalahan lingkungan WALHI Sulawesi Selatan yang akan dihubungi untuk mengadvokasi.<sup>19</sup> Pendapat WALHI Sulawesi Selatan menunjukkan keterkaitan dengan pandangan*

*dalam green political theory yang berpendapat bahwa untuk keberhasilan dalam pelestarian lingkungan hidup, dibutuhkan komunitas yang lebih kecil selain negara yaitu masyarakat yang hidup dan bersentuhan langsung dengan lingkungan, sebab masyarakatlah yang lebih mengenal dengan baik keadaan lingkungan disekitarnya, serta masyarakat pula memiliki hak dalam penggunaan sumber daya alam, maka dari itu WALHI Sulawesi Selatan hadir untuk memperjuangkan hak-hak lingkungan yang kini telah banyak dilupakan.*

*Berdasarkan advokasi-advokasi diatas, WALHI Sulawesi Selatan mewujudkan kerjanya dengan menyesuaikan nilai dan prinsip dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang ke-15 untuk "melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati" melalui upaya-upaya berikut:*

*1. Studi dan Lobi terhadap Karst Maros-Pangkep, Sulawesi Selatan*

*Karst pada umumnya dikenal sebagai gunung batu kapur yang didalamnya terdapat goa-goa dan di dinding tebing ditanami tumbuhan berupa pepohonan. Goa-goa dikawasan karst biasanya terdapat tetesan air dan sungai yang kemudian membentuk kolam air. Karst dikawasan Maros dikenal sebagai sumber kehidupan masyarakat Maros beserta makhluk hidup lainnya yang tumbuh dan tinggal di kawasan karst. Hasil studi WALHI Sulawesi Selatan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa ekspansi tambang yang semakin meluas tanpa memperhatikan keberlangsungan sumber daya alam di kawasan karst Maros-Pangkep dapat mengancam kelestarian lingkungan. Studi ini juga menunjukkan ada 57 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan wilayah karst Maros-Pangkep, yang terdiri atas tambang marmer, tambang pasir, tambang batubara, dan tambang tanah liat.<sup>20</sup>*

*Hasil dari studi karst juga telah menggambarkan adanya ketidaksinambungan antara pemanfaatan sumber daya di ekosistem darat dengan ide yang ada dalam politik hijau dan pembangunan berkelanjutan. Terbukti dengan aktivitas operasi perusahaan-perusahaan tambang yang ada di kawasan Karst tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dalam gerakan ekologi yang ada pada politik hijau. Maka dari itu, sebagai sebuah lembaga yang peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup dan sumber daya alam, WALHI Sulawesi Selatan melakukan studi dan penelitian agar dapat*

*menunjukkan dan memperjuangkan kembali hak-hak lingkungan wilayah karst serta keadilan terhadap pemanfaatan sumber daya alam didalamnya, agar keuntungan bukan hanya diperoleh satu pihak saja (pemilik usaha), melainkan kepada semua masyarakat wilayah karst serta makhluk hidup lain yang tinggal didalamnya.*

## **2. Studi dan Lobi terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang, Gowa, Sulawesi Selatan**

*Daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh punggung-punggung bukit yang menampung air hujan dan mengalirkannya melalui saluran air, dan kemudian berkumpul menuju suatu muara sungai, laut, danau atau waduk. Setelah melakukan studi investigasi dan kajian ruang, ternyata DAS Jeneberang sekarang berada dalam posisi yang sangat kritis. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya lahan hutan untuk menahan air hujan. Diketahui angka minimal hutan di wilayah DAS adalah sebesar 30% sedangkan yang tersisa di wilayah DAS Jeneberang hanya 16,8%. Sedangkan 83% lebih lahan lainnya digunakan sebagai aktifitas di luar fungsi resapan air. Rinciannya 28 persen digunakan sebagai area persawahan, 41% area pertanian, 8,9% kawasan penduduk, 1,3% Waduk Bili-bili, dan 3,5% aktifitas lainnya. Hasil pemetaan WALHI Sulawesi Selatan terdapat delapan titik erosi dan longsor yang terjadi di sepanjang DAS Jeneberang. Erosi dan longosoran itu kemudian membawa material lumpur di dalam aliran sungai. Kondisi itulah yang semakin memperparah dampak bencana yang berpotensi terjadi, seperti banjir. Oleh karena itu, hutan di daerah DAS harusnya terus dipelihara kelestariannya agar dapat menahan arus hujan yang dari hulu ke hilir agar potensi bencana juga dapat berkurang.<sup>21</sup>*

*Mengenai masalah ini, WALHI Sulawesi Selatan melakukan lobi dengan Pemprov Sulawesi Selatan kemudian menjekaskan hasil studi yang menunjukkan adanya degradasi hutan dan lahan yang disebabkan oleh buruknya pengelolaan sumber daya alam di daerah hulu dan hilir. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan potensi terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor.<sup>22</sup> WALHI Sulawesi Selatan juga mendesak pemerintah agar harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih tegas dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dari hulu ke hilir dengan menghentikan segala bentuk kegiatan yang merusak lingkungan, pemulihan daerah resapan air dan daerah aliran sungai. Sejauh ini lobi yang dilakukan WALHI Sulawesi Selatan terkait DAS Jeneberang belum membuahkan hasil, sebab pemerintah masih masih melakukan studi dan investigasi untuk selanjutnya menentukan sebuah kebijakan mengenai masalah ini.<sup>23</sup>*

### 3. Kampanye Hijau Melalui Media Sosial

*Kampanye yang paling aktif dilakukan oleh WALHI Sulawesi Selatan adalah melalui media sosial. Sebab media sosial dianggap sebagai platform yang paling efektif untuk menyampaikan suatu ide dan pesan kepada siapa saja yang melihatnya. Didukung pula oleh globalisasi sehingga Sebagian besar masyarakat dapat dengan mudah melihat kegiatan-kegiatan WALHI Sulawesi Selatan di media sosial yang diharapkan dapat mendorong dan memberikan pesan hijau kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa kampanye yang dilakukan oleh WALHI Sulawesi Selatan melalui media sosial:*

Gambar 1: Kampanye WALHI Sulawesi Selatan melalui website resmi<sup>24</sup>



Gambar 2: Kampanye WALHI Sulawesi Selatan melalui media sosial Twitter<sup>25</sup>



Gambar 3: Kampanye WALHI Sulawesi Selatan melalui media sosial Instagram<sup>26</sup>



## ***Hambatan yang Dihadapi oleh WALHI Sulawesi Selatan dalam Melakukan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Berdasarkan Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yang Ke-15***

*Dalam tinjauan Dalam tinjauan lingkungan hidup oleh WALHI Sulawesi Selatan, dijelaskan betapa penting dan mengikatnya tujuan-tujuan serta target-target yang ingin diwujudkan dalam SDGs dengan tujuan yang ingin dicapai oleh WALHI Sulawesi Selatan sendiri. Salah satu prinsip dari SDGs yaitu bumi menunjukkan secara tidak langsung bahwa SDGs juga merupakan tanggung jawab yang harus diupayakan pencapaiannya oleh WALHI Sulawesi Selatan. Namun, untuk mewujudkan SDGs khususnya pada tujuan yang ke-15 bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu, diperlukan kerjasama dan antusias dari masyarakat, organisasi, serta pemerintah yang berkomitmen dalam mewujudkannya.*

*Sebagai lembaga yang selalu melakukan advokasi lingkungan hidup, WALHI Sulawesi Selatan menemukan beberapa hambatan dalam mewujudkan tujuan ke-15 dari penerapan Sustainable Development Goals (SDGs). Hambatan-hambatan tersebut terbagi menjadi atas 2 faktor antara lain:*

### ***1. Faktor Internal***

*Maksudnya adalah hambatan yang di hadapi oleh WALHI Sulawesi Selatan dalam pencapaian SDGs yang ke-15 yang berasal dari dalam organiniasi atau lembaga WALHI Sulawesi Selatan itu sendiri. Faktor-faktor tersebut berupa:*

#### ***1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)***

*Faktor internal pertama yang dihadapi oleh WALHI Sulawesi Selatan dalam melaksanakan upaya-upayanya adalah sumber daya manusia yang kurang. Sulawesi Selatan bukanlah wilayah yang kecil, dengan total luas keseluruhan sebesar 46.717 km<sup>2</sup> memaksa WALHI Sulawesi Selatan untuk lebih jeli lagi melihat dan mengupayakan pelestarian lingkungan hidup sesuai dengan tujuan dan target dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Apalagi dalam upayanya WALHI Sulawesi Selatan tidak hanya berfokus kepada SDGs yang ke-15, melainkan juga pada tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) lainnya yang berhubungan dengan lingkungan hidup seperti pola konsumsi dan produksi, konservasi sumber air, perubahan iklim, dan konservasi sumber daya laut. Hal tersebut kadang kala mengakibatkan WALHI Sulawesi Selatan kesulitan dalam melaksanakan kerja-kerjanya.<sup>27</sup>*

#### ***2. Permasalahan Finansial***



*Faktor penghambat internal yang terakhir adalah masalah finansial. WALHI Sulawesi Selatan yang tetap menjaga konsistensinya untuk tidak terikat dengan pemerintah, memaksakan WALHI Sulawesi Selatan untuk mencari dana sendiri. Sumber dana WALHI Sulawesi Selatan diperoleh dari iuran anggota, sumbangan dari masyarakat, swasta, atau lembaga lain baik nasional maupun internasional selama tidak mengikat dan tidak bersumber dari hasil kegiatan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat seperti, utang luar negeri maupun pemberian dari lembaga pemberi hutang yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung, serta dana yang berasal dari korupsi dan kejahatan ekonomi. Selain itu WALHI Sulawesi Selatan juga memperoleh dana melalui usaha-usaha lain yang legal dan tidak bertentangan dengan visi, misi dan nilai-nilai WALHI Sulawesi Selatan. Hal ini mengakibatkan pengawalan kasus yang terjadi di daerah-daerah yang rawan atau sering mendapat kerusakan lingkungan itu kurang massif contohnya wilayah-wilayah yang berada diujung Sulawesi Selatan seperti Luwu, Palopo dan Toraja.<sup>28</sup>*

## **2. Faktor Eksternal**

*Berupa hambatan yang di hadapi WALHI Sulawesi Selatan namun berasal dari luar organisasi atau lembaga WALHI Sulawesi Selatan itu sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain:*

- 1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup dan minimnya pengetahuan mengenai Sustainable Development Goals (SDGs). Apabila ditinjau dari kelima poin utama dalam SDGs antara lain manusia, bumi, kemakmuran, perdamaian, dan kerjasama. Dapat disimpulkan bahwa manusia/masyarakat adalah penyebab utama dari dibentuknya SDGs dengan alasan tujuan-tujuan serta target yang ditentukan merupakan kepentingan dasar yang ingin dicapai dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini, upaya pelestarian lingkungan hidup mulai dari ekosistem air dan daratan juga tidak dapat dilepaskan dari kepentingan masyarakat. Meskipun begitu, masih banyak masyarakat yang belum mengerti sepenuhnya arti dari pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Kesadaran masyarakat Sulawesi Selatan akan pentingnya*

*menjaga dan melestarikan lingkungan yang masih kurang dapat berimbang pada pengawalan WALHI Sulawesi Selatan. Bahkan terkadang diberbagai kasus yang dikawal oleh WALHI Sulawesi Selatan tidak mendapat respon yang positif.*

- 2. Semakin masifnya perusahaan tambang yang beroperasi di Sulawesi Selatan. Perilaku perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Sulawesi Selatan cenderung tidak peduli dengan dampak lingkungan yang terjadi. Bahkan masih ada perusahaan yang tetap aktif melakukan aktivitasnya tanpa dilengkapi AMDAL dan izin lingkungan. Maka sudah sangat jelas pula bahwa persoalan lingkungan hidup ini tidak dapat dipisahkan dengan keberpihakan penyelenggara (pemerintah). WALHI Sulawesi Selatan percaya bahwa pencegahan kerusakan lingkungan hidup sangat ditentukan oleh sikap proaktif pemerintah. Sikap pemerintah yang selama ini abai terhadap lingkungan hidup telah mengakibatkan kerusakan lingkungan terus meluas hingga berefek secara signifikan terhadap masyarakat dan wilayah kelolanya, baik yang hidup di desa maupun di kota.<sup>29</sup>*

## **Conclusion**

*Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen berjudul Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development, berisi 17 tujuan dan 169 sasaran yang disepakati pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 70 pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat. Jika merujuk pada 17 agenda Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah disepakati, terdapat 5 hal yang berhubungan langsung dengan agenda penyelamatan lingkungan dimana memuat tujuan-tujuan hijau yaitu pola konsumsi dan produksi, konservasi sumber air minum, perubahan iklim, konservasi ekosistem darat dan konservasi sumber daya laut.*

*Sebagai salah satu lembaga yang berfokus terhadap isu lingkungan hidup, WALHI Sulawesi Selatan turut menunjukkan komitmennya dengan menjalankan berbagai upaya dalam mewujudkan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Berlandaskan tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang ke-15 serta sesuai dengan pemikiran dalam*

*green political theory dan pembangunan berkelanjutan, WALHI Sulawesi Selatan telah menerapkan upaya-upaya berupa advokasi dengan melakukan studi terhadap aktivitas yang dapat merusak lingkungan, melakukan kampanye demi memberikan pengertian kepada khalayak umum betapa pentingnya menjaga lingkungan hidup, mengadakan kegiatan sosialisasi atau penguatan masyarakat untuk mendampingi masyarakat agar mendapatkan keadilan dalam penggunaan sumber daya alam, serta melakukan lobi dengan pihak-pihak tertentu (pemerintah dan pemilik usaha) agar dalam membuat kebijakan yang juga memperhatikan unsur lingkungan.*

*Melalui upaya-upaya diatas, WALHI Sulawesi Selatan telah memberikan sumbangsi terhadap pelestarian lingkungan hidup di Sulawesi Selatan. Namun apabila ditinjau secara menyeluruh, upaya-upaya tersebut belum membawa perubahan yang besar sehingga dapat disimpulkan upaya tersebut belum sampai pada target hijau dalam Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya yang ke-15. Hal ini disebabkan oleh adanya hambatan yakni faktor tingginya angka degradasi hutan, rusak dan berkurangnya kapasitas lahan, serta semakin masifnya tata kelola pembangunan dan aktivitas perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Sulawesi Selatan.*

*Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan dalam pencapaian Sustainable Deveopment Goals (SDGs) tidak dapat diukur semata-mata dari satu atau beberapa tujuan saja. Ke-5 prinsip-prinsip (people, planet, peace, prosperity, partnership) yang telah ditetapkan dalam SDGs seharusnya dapat saling berjalan berdampingan. Namun, apabila ditinjau dalam penerapannya, salah satu prinsip tersebut bisa saja menghambat pencapaian prinsip lainnya. Misalnya, untuk mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik, setidaknya pembangunan terutama industrialisasi seperti perusahaan-perusahaan asing harus dikurangi. Namun kenyataanya, SGD's sendiri membawa prinsip partnership yang artinya negara atau pemerintah dapat membuka sebesar-besarnya peluang untuk bekerja sama dengan siapa pun demi kemajuan wilayahnya. Keambiguan inilah yang menjadi dilema dalam mewujudkan Sustainable Deveopment Goals (SDGs) itu sendiri. Untuk itu, diperlukan strategi kebijakan dan evaluasi terkait pelestarian lingkungan hidup dan pelaksana pembangunan dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) agar dapat mempercepat terwujudnya pembangunan yang berkeadilan terhadap lingkungan hidup.*

## Endnotes

1. Hermawan, P. Yulius, 2007. *Transformasi Dalam Studi Hubungan Internasioanal: Aktor, Isu dan Metodologi Edisi Pertama*: Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 3.
2. United Nations: About Sustainable Development Goals dalam <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/> diakses pada 1 April 2019.
3. Wahyuningsih Darajati, 2018. *Sinkronisasi RPJMD dengan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: Kementerian PPN / Bappenas.
4. Wahana Lingkungan Hidup: Sejarah Lahirnya WALHI dalam <https://walhi.or.id/sejarah/> diakses pada 20 April 2019.
5. WALHI Sulawesi Selatan: Sejarah Terbentuknya WALHI Sulawesi Selatan dalam <https://walhisulsel.or.id/sejarah-walhi-sulsel/#1543407594937-d990950b-3fef> diaskes pada 20 April 2019.
6. Situs Berita Lingkungan Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2016/10/18/walhi-kondisi-lingkungan-hidup-di-sulsel-memburuk/> diakses pada 6 Agustus 2019.
7. Bastian Indra, 2007. *Akuntansi Untuk LSM dan Partai Politik*. Erlangga. Yogyakarta, hlm 8. 2
8. Culla Adi Suryadi. 2006. *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*. Jakarta, hlm 68.
9. Fahmi Himmawan. 2017: *Kemitraan Pemerintah Dan NGO/LSM Dalam Menangani Limbah Industri Batik Di Kampoeng Laweyan*. Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
10. Jackson, Robert & Sorensen, G. 1999. *Introduction to International Relations*. Oxford University Press hlm 322-323.
11. Apriawan 2011, *Teori Hijau: Sebuah Alternatif dalam Perkembangan Hubungan Internasional*, Multiversa Journal of International Studies Vol.02 No.01.
12. Abdurrahman, 2003. *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia*. Makalah disajikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli.
13. United Nations Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future dalam <http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf> pada 21 April 2019.
14. Abdurrahman, loc.cit.
15. United Nations: Sustainable Development Goals dalam <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/> diakses pada 1 April 2019.
16. Wawancara tidak terstruktur dengan Direktur Walhi Sulawesi Selatan Muhammad Al Amin pada 24 Juni 2019 di Kantor WALHI Sulawesi Selatan.
17. Wawancara tidak terstruktur dengan Direktur Walhi Sulawesi Selatan Muhammad Al Amin pada 24 Juni 2019 di Kantor WALHI Sulawesi Selatan.
18. Ibid
19. Dokumen WALHI Sulawesi Selatan: *Perkembangan WALHI Sulawesi Selatan 2006-2016*.

20. Dokumen WALHI Sulawesi Selatan: *Pentingnya Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Karst Maros*. hlm 3.
21. Wawancara tidak terstruktur dengan Riski Saputra, anggota Unit Kajian dan Data WALHI Sulawesi Selatan pada 1 Juli 2019 di Kantor WALHI Sulawesi Selatan.
22. <https://www.indopos.co.id/read/2019/01/24/163082/walhi-desak-pemprov-sulsel-evaluasi-tata-kelola-lingkungan-das> diakses pada 13 Juli 2019.
23. Wawancara tidak terstruktur dengan Riski Saputra, anggota Unit Kajian dan Data WALHI Sulawesi Selatan pada 1 Juli 2019.
24. Kampanye WALHI Sulawesi Selatan <https://walhisulsel.or.id/kampanye/> diakses pada 1 September 2019.
25. Twitter WALHI Sulawesi Selatan [https://twitter.com/walhi\\_sulsel?lang=en](https://twitter.com/walhi_sulsel?lang=en) diakses pada 1 September 2019.
26. Instagram WALHI Sulawesi Selatan <https://www.instagram.com/walhi.sulsel/> diakses pada 1 September 2019.
27. Wawancara tidak terstruktur dengan Riski Saputra, anggota Unit Kajian dan Data WALHI Sulawesi Selatan pada 31 Juli 2019 di Kantor WALHI Sulawesi Selatan.
28. Dokumen WALHI Sulawesi Selatan 2017: *Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Advokasi*.

## References

- Hermawan, P. Yulius, 2007. *Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi Edisi Pertama*: Graha Ilmu, Yogyakarta.
- United Nations: About Sustainable Development Goals dalam <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/> diakses pada 1 April 2019
- Wahyuningsih Darajati, 2018. *Sinkronisasi RPJMD dengan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: Kementerian PPN / Bappenas.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2016. *Tinjauan Lingkungan Hidup: Keharusan Pembentukan Struktural Untuk Perbaikan Tata Kelola*.
- WALHI Sulawesi Selatan: Sejarah Terbentuknya WALHI Sulawesi Selatan dalam <https://walhisulsel.or.id/sejarah-walhi-sulsel/#1543407594937-d990950b-3fef> diakses pada 20 April 2019
- Situs Berita Lingkungan Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2016/10/18/walhi-kondisi-lingkungan-hidup-di-sulsel-memburuk/> diakses pada 6 Agustus 2019
- Bastian Indra, 2007. *Akuntansi Untuk LSM dan Partai Politik*. Erlangga. Yogyakarta.
- Culla Adi Suryadi. 2006. *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di*

*Indonesia*. Jakarta.

Fahmi Himmawan. 2017: *Kemitraan Pemerintah Dan NGO/LSM Dalam Menangani Limbah Industri Batik Di Kampoeng Laweyan*. Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Jackson, Robert & Sorensen, G. 1999. *Introduction to International Relations*. Oxford University Press.

Apriawan 2011, *Teori Hijau: Sebuah Alternatif dalam Perkembangan Hubungan Internasional*, Multiversa Journal of International Studies Vol.02 No.01.

Abdurrahman, 2003. *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia*. Makalah disajikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli.

United Nations Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future dalam <http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf> 21 April 2019

United Nations: Sustainable Development Goals dalam <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/> diakses pada 1 April 2019

Dokumen WALHI Sulawesi Selatan: *Perkembangan WALHI Sulawesi Selatan 2006- 2016*.

Dokumen WALHI Sulawesi Selatan: *Pentingnya Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Karst Maros*.

<https://www.indopos.co.id/read/2019/01/24/163082/walhi-desak-pemprov-sulsel-evaluasi-tata-kelola-lingkungan-das> diakses pada 13 Juli 2019

Kampanye WALHI Sulawesi Selatan <https://walhisulsel.or.id/kampanye/> diakses pada 1 September 2019.

Twitter WALHI Sulawesi Selatan [https://twitter.com/walhi\\_sulsel?lang=en](https://twitter.com/walhi_sulsel?lang=en) diakses pada 1 September 2019.

Instagram WALHI Sulawesi Selatan <https://www.instagram.com/walhi.sulsel/> diakses pada 1 September 2019.

Dokumen WALHI Sulawesi Selatan 2017: *Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Advokasi.*

**SKRIP WAWANCARA**

**Nama: Aydil Safitri**

**Jurusan: Ilmu Hubungan Internasional**

**Konsentrasi: Ekonomi Politik Internasional**

**Mahasiswa Universitas Fajar Makassar**

**Wawancara I**

*Senin, 24 Juni 2019*

*Di Kantor WALHI Sulawesi Selatan*

*Nama Informan : Muhammad Al Amin (Direktur Walhi Sulawesi Selatan)*

*Riski Saputra (Anggota Unit Kajian dan Data WALHI Sulawesi Selatan)*

**Daftar Pertanyaan:**

1. *Bagaimana WALHI memandang Sustainable Development Goals (SDGs)?*
2. *Bagaimana keterkaitan antara WALHI Sulawesi Selatan dengan Sustainable Development Goals (SDGs)?*
3. *Apa peran yang dijalankan WALHI Sulawesi Selatan dalam mengupayakan terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs)?*

**Wawancara II**

*Senin, 1 Juli 2019*

*Di Kantor WALHI Sulawesi Selatan*

*Nama Informan : Riski Saputra (Anggota Unit Kajian dan Data WALHI Sulawesi Selatan)*

**Daftar Pertanyaan:**

1. *Apa saja upaya yang dilakukan oleh WALHI Sulawesi Selatan dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) yang ke-15?*
2. *Bagaimana advokasi yang diusahakan oleh WALHI Sulawesi Selatan Selatan dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) yang ke-15?*
3. *Apa hambatan WALHI Sulawesi Selatan dalam melakukan advokasi untuk mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) yang ke-15?*

**Wawancara III**

*Selasa, 23 Juli 2019*

*Di Kantor WALHI Sulawesi Selatan*

*Nama Informan : Riski Saputra (Anggota Unit Kajian dan Data WALHI Sulawesi Selatan)*

**Daftar Pertanyaan:**

1. *Bagaimana respon masyarakat dan pemerintah dalam advokasi yang dilakukan?*
2. *Sejauh apa hasil yang didapatkan dalam advokasi yang telah dilakukan?*